MEKANISME PASAR SYARI'AH LAPIS

Artikel Yang Membahas Tentang Jantung Ekonomi Pasar Besar Dan Hukum Industri Dalam Islam

OLEH : AINUL YAQIN (90500120081)

JANTUNG EKONOMI PASAR BESAR

Jantung ekonomi kapitalisme itu adalah bank dan pasar modal disebut jantung karena itu adalah pusat peredaran darah dimana semua darah itu masuk dan semua darah keluar darinya dan didalam ekonomi kapitalis dalam sistem ekonomi kapitalisme itu pusat peredaran darah nya itu adalah bank dan pasar modal oleh karena itu kita bisa melihat fungsi bank dan pasar modal itu bisa menyedot semua uang yang beredar di seluruh negara bahkan seluruh dunia itu juga sedotan nya pada bank atau pasar modal maka, perputaran uang di situ luar biasa besarnya. Profesor John Gray mengatakan 95% uang beredar di lantai bursa seluruh dunia dan yang beredar di pasar sektor riil di perdagangan itu hanya 5%. Uang yang muter-muter 95% hanya di transaksikan di lantai bursa yang itu adalah perjudian besar atau jual beli saham .

Sekarang mekanisme sistem ekonomi pasar bebas ini sudah menguasai seluruh dunia mungkin boleh di bilang hampir 95% negara-negara di dunia menerapkan ekonomi pasar bebas. Bedanya dengan pasar menurut Islam intinya sama yaitu mekanisme harga tidak boleh di tetapkan oleh negara tetapi harus di tetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, tapi harus dijaga dengan delapan lapis penjagaan.

HUKUM BANK KONVENSIONAL

Posisi utama dari bank itu adalah lembaga intermediasi karena menghubungkan dua sektor masyarakat yang disebut masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kalau dalam diagram rumah tangga dianggap ada kelebihan dana sedangkan pengusaha dianggap masyarakat yang kekurangan dana. Kalau masyarakat yang kekurangan dana atau yang butuh modal langsung nyari dana ke masyarakat itu bisa dibayangkan berapa puluh tahun harus menyelesaikan hanya untuk mencari 1 miliar saja. Misalnya kita harus membawa proposal dari rumah ke rumah menawarkan Investasi di perusahaan mengumpulkan uang 100 ribu dari tetangga yang satu ke tetangga yang lain. Untuk mendapatkan 1 miliar saja butuh beberapa tahun untuk mengumpulkannya. Tapi, dengan adanya lembaga intermediasi itu membuat semua orang yang kelebihan uang walaupun 100ribu sampai 1 juta semua dikumpulkan masuk ke bank akhirnya dalam waktu singkat bisa triliunan uang masuk ke dalam bank tidak perlu dari rumah ke rumah tinggal di umumkan siapa yang punya uang lebih langsung masuk. Imining-iming nya adalah di beri bunga, istilah nya mereka di minta menabung uang nya ke bank kemudian diberikan Prosen bunga. Kemudian kalau uang sudah terkumpul masyarakat yang kekurangan dana tidak usah lagi keliling kampung , keliling dari rumah ke rumah langsung datang ke bank maka, hanya dalam beberapa waktu yang singkat mungkin maksimal sudah cair. Maka semua transaksi baik menabung maupun meminjamkan transaksinya cuma dengan satu akad yaitu utang piutang atau pinjam- meminjam yang di sebut chord. Maka kalau di suruh meninjau apa hukumnya apakah bunga itu sama dengan riba yaitu kembali pada definisi riba.

Menurut istilah syari'ah riba nasi'ah adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran, tanpa ada pengganti, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu (Abdul Aziz al-Khayyath, Asy-Syarikat. 2/1(3)). Kesimpulannya bunga bank itu sama dengan riba nasi'ah bukan yang riba fadhli itu adalah tukar-menukar barang yang Islam Times yang sejenis atau tidak sejenis.

Dalil-dalil "setiap utang-piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba" (HR. Baihaqi). Riba itu muncul dari utang-piutang yang menghasilkan manfaat.

HUKUM BANK SYARI'AH

Prinsip operasional bank syari'ah kerangkanya sama dengan bank konvensional.

Bank syari'ah posisinya adalah lembaga intermediasi sama-sama menghubungkan antara masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana. -piutang lagi. rumus menghitungnya bagaimana Prosen kali pokok modal namanya bunga tapi kalau bagi hasil Prosen kali keuntungan. Jadi Prosen kali profit itu namanya bagi hasil itu sangat berbeda. Oleh karena itu yang disebut bunga inilah yang ingin dihilangkan di bank sehingga ketika masyarakat menabung itu disalurkan investasi bukan menabung. Investasi haknya mendapatkan bagi hasil kemudian, ketika bank sudah mendapatkan uang maka, bank menawarkan uang itu.

AKAD PENGHIMPUNAN DANA

a. Bank konvensional terdiri dari:

1. Giro
2. Tabungan

3. Deposito

b. Bank syariah

1. 1.Giro wadhi'ah
2. 2.Tabungan Mudharabah
3. 3.Deposito Mudharabah.

A. .Hukum Tabungan dan Deposito Mudharabah

- Menurut Imam Al Mawardi , syarat akad Mudharabah yang diakui ada tiga
 - a) 1.Harus ada salah satu pihak yang secara khusus berkontribusi dalam modal (mal).
 - b) 2.Harus ada pihak yang lain secara khusus berkontribusi dalam melakukan pengelolaan ('amal).
 - c) Kedua pihak tau bagian (nisbah) keuntungan masing-masing.

➤ Konsekuensinya :

- -Pihak bank yang berposisi sebagai pengelola (mudharib)di syartkan adalah pihak yang dapat melakukan tasharruf (pengelolaan) secara langsung terhadap dana yang telah di serahkan nya.
- -Dana yang telah diserahkan kepada pihak bank ini tidak boleh diserahkan pada pihak lain untuk di kelola.
- -Jika dana tersebut kemudian di serahkan kepada pihak lain,maka status bank sebagai mudharib secara otomatis akan hilang.
- -Menurut Syaikh An-Nabhany, dalam akad muamalah pihak yang

menjadi subyek akan tidak boleh diwakilkan. Yang boleh dilakukan hanyalah dalam hal mewakilkan akad-nya saja. Perbedaannya terletak pada mewakilkan akad dengan mewakilkan menjadi subjek akad . Mewakilkan subjek akad itu tidak boleh.

Akad Penyaluran Dana:

- 1) Bagi Hasil (profit sharing). - Al- Mudharabah - Al- Musyarakah
- 2) 2.Jual Beli (Sale And Purchase) - Ba'i Al- Mudharabah - Ba'i As-Salam - Ba'i Al- Istishna'
- 3) 3.Sewa(Operational Lease And Financial Lease) - Al- Ijarah - Al- Ijarah Al- Muntahia Bit-Tamlik 4.Jasa (Fee- Based Services) - Al- Wakalah - Al -Kalfalah - Al-Hawalah - Ar- Rahn - Al- Qardh.

.Hukum Pembiayaan Al- Mudharabah

Dalam penyaluran dana dengan menggunakan akad Mudharabah,maka posisi Bank tidak dapat dianggap sebagai shahibul mal,sebab dana tersebut bukanlah dana milik bank , tetapi dana tersebut milik shahibul mal yang sesungguhnya, yaitu

- pihak nasabah penabung atau deposan
- pihak bank justru posisinya sebagai mudharib.

Oleh Karena itu ,akad Mudharabah ini menjadi tidak, karena nasabah penerima penyaluran dana yang akan bertindak sebagai mudharib itu akan mengelola dana yang bukan haknya,sehingga tidak boleh di kelola.

Hukum Pembiayaan Al-Musyarakah

Dalam akad Musyarakah,maka ada ketentuan bahwa masing-masing pihak, yaitu pihak bank dan nasabah penerima dana, harus terlibat dalam dua proses sekaligus, yaitu penyertaan dan, sekaligus terlibat dalam pengelolaan proyek bisnis secara langsung. - Namun pada

praktiknya, pihak bank ternyata tidak ikut berperan secara langsung terhadap proyek-proyek bisnisnya. Yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan proyek bisnis hanyalah pihak nasabah penerima dana.

Hukum Pembiayaan Al- Murabahah

Ketentuan murabahah yang mengharuskan pihak bank syari'ah membiayai sebagian atau seluruh harga yang di sepakati kualifikasinya, hal itu dapat dianggap bertentangan dengan fakta bahwa posisi bank syariah adalah sebagai penjual. - Padahal ketentuan bagi pihak penjual adalah menjual barang yang telah dimiliki kepada pihak pembeli, yaitu nasabah. -Jika dalam praktiknya pihak bank syari'ah akan membiayai sebagian, dan sebagian yang lain harus di bayar oleh pembeli sendiri, maka bank syari'ah sesungguhnya telah bertindak sebagai pihak yang menghubungi pembeli, bukan menjadi pihak penjual.

Konsekuensinya:

Dalam akad murabahah tersebut yang berlaku hanyalah jual beli dengan hutang, namun hutang-piutang murni, sehingga pihak bank syari'ah tidak boleh menetapkan harga beli di tambah keuntungannya.

Sebab statusnya adalah utang-piutang, maka pembayarannya harus sama dengan jumlah hutangnya. Jika ada tambahan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai riba.

Dalam haditsnya sebagai berikut: "setiap utang-piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba" (hr.baihaqi).

HUKUM PASAR MODAL

Mekanisme Transaksi Di Pasar Modal.

- Mekanisme transaksi saham dan obligasi di pasar saham mempunyai banyak model.

- Paling tidak ada 4 modal mekanisme transaksi saham dan obligasi yang penting,yaitu:
 1. Spot
 2. Trading On Margin
 3. Short Sale
 4. Option

Ketetapan Majma' Fiqh Islam

1. Transaksi spot atas saham hukumnya boleh, selama saham tersebut sudah ada dalam kepemilikan penjual dan selama obyek aktivitas perusahaan tidak haram, seperti perusahaan bank ribawi, minuman keras dsb.
2. Transaksi spot untuk obligasi dengan segala macam derivat dan bentuk nya adalah haram, karena mengandung riba .
3. Transaksi trading on margin hukumnya haram, karena menyatukan dua akad dalam satu akad, yaitu akad jual beli dan akad pinjaman . Selain itu, akad pinjamannya mengandung bunga atau riba yang diharamkan.
4. Akad shor sale hukumnya haram, karena jual-belibya fiktif dengan tujuan hanya untuk meraih keuntungan dari perbedaan harga semata, sementara barang diperjualbelikan belum menjadi dimiliki penjual secara sempurna.
5. Akad options hukumnya haram, karena di bangun atas spekulasi ,dimana penjual dan pembeli mananti keberuntungan dari perubahan harga (fluktuasi).
6. Transaksi future dan forward hukumnya haram , karena jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan juga termasuk jual beli al-kali' bi al-

kali' (jual-beli hutang dengan hutang).

Pasar Modal Syari'ah

pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh Karena itu, Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak dimiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan ketentuan Majma'Fiqh Islami

maka kriteria Pasar Modal Syariah adalah:

- Saham ditransaksikan di Pasar Modal Syari'ah haruslah berasal dari perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal saja.
- Bentuk transaksi saham yang diperbolehkan adalah transaksi spot atau transaksi masa sekarang.
- Semua bentuk obligasi dan turunannya adalah haram untuk ditransaksikan. Kritik Terhadap Pasar Modal Syari'ah.
- Dalam menghukum transaksi di Pasar Modal Syari'ah, seharusnya dimulai dari menghukum keberadaan akad PT. –
- Jika ditinjau dari hukum wadh'i, maka akad pendirian PT, paling tidak memiliki 2 bentuk kebathilan ,yaitu:
 1. Pada PT tidak ada dua pihak yang melakukan akad secara sempurna,yaitu adanya ijab dan qabul.
 2. Tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola, yang ada hanya

pemodal saja(syarikul mal), Sedangkan pengelolaan justru diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat dalam akad perseoran ,yaitu **dewan direksi**.

Konsekuensi:

- PT dianggap hanya merupakan kesepakatan sepihak saja terhadap syarat tertentu,bukan merupakan kesepakatan dua belah pihak.
- Jika akad pembentukannya adalah bathil,maka saham yang diterbitkan oleh PT juga bathil.
- Konsekuensi berikutnya, jika berbagai saham yang diterbitkan oleh PT adalah bathil,maka memperjualbelikan saham PT hukumnya juga tidak sah (bathil). Kesimpulannya bank dan pasar modal itu sulit disyariahkan.

HUKUM INDUSTRI DALAM ISLAM

- Dalam perekonomian dunia saat ini,bidang industri dapat dipandang sebagai sektor yang memegang peranan yang sangat penting
- Sehingga,dapat dikatakan bahwa maju mundurnya perekonomian suatu Negara sangat ditentukan oleh kemajuan bidang industrinya
- dipimpin oleh sistem ekonomi tertentu
- Pilihan system ekonomi itu akan sangat menentukan corak dan warna perindustrian yang akan berkembang
- Termasuk,apakah pengembangan bidang industry itu akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya secara menyeluruh,atau hanya segelintir rakyatnya saja akan menikmatinya.

AKAR MASALAH DI BIDANG INDUSTRI

Pembahasan pengembangan bidang industry memang akan menyangkut banyak hal,namun paling tidak ada 4 hal penting yang terkait dengan masalah

pengembangan industry:

1. Bentuk modal perusahaannya
2. Kepemilikan alat-alat industrinya
3. Pengembangan modal industrinya
4. Ketenagakerjaan di bidang industrinya

Dari keempat hal di atas yang paling penting adalah butir yang kedua yaitu alat-alat industrinya Sedangkan butir 1 3 dan 4 adalah hal-hal yang tidak terkait secara langsung oleh sector industry

PANDANGAN EKONOMI KAPITALISME

- Sistem ekonomi kapitalisme memiliki pandangan yang khas terhadap kepemilikan alat industry yang adil dan juga pada derives-derivasinya
- Pandangan yang adil terhadap kepemilikan alat industry adalah bahwa kepemilikan alat-alat produksi adalah hak dari semua manusia
- Setiap individu maupun swasta bebas memiliki alat-alat industry
- Konsekuensi dari pandangan tersebut di dalam system ekonomi kapitalisme bagi individu maupun swasta tidak hanya di bebaskan dalam kepemilikan alat-alat produksi namun juga bebas dalam memproduksi berbagai barang apapun mengembangkannya memperbesarnya memperbanyak ragamnya tanpa ada batasan-batasan lagi

DAMPAK KAPITALISME INDUSTRI

- Munculnya persaingan bebas tanpa batas dalam kepemilikan alat-alat produksi
- Terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakmerataan dalam kepemilikan alat-alat produksi yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat

ekonomi

- Industry besar akan semakin besar dan industry kecil akan kalah dan tersingkir dari kanca ekonomi
- Pemilik industry yang kalah akan tersingkir dan selanjutnya hanya akan menjadi buruh atau kawan pada pihak pemilik industry yang menang
- Munculnya berbagai bentuk perkongsian industry besar yang semakin mendorong terciptanya kepemilikan industry yang besar
- Munculnya eksploitasi kaum buruh demi terwujudnya industry yang semakin besar
- Munculnya kapitalisme industry global yang dapat menyebabkan sebagian besar rakyat dunia yang menderita kemiskinan yang parah

PANDANGAN SOSIALISME

- Adanya kebebasan bagi individu maupun swasta untuk memiliki alat-alat produksi adalah suber dari segala sumber ketidakadilan ekonomi
- Penataan sector industry yang adil adalah hak kepemilikan alat-alat produksi bagi individu maupun swasta harus di hapuskan
- Kepemilikan alat-alat industry tersebut semuanya akan di kuasai oleh Negara
- Negaralah yang harus berperan dalam mengatur produksi harga distribusi dan pengupahan buruh dari semua sector industry yang sudah di kuasai oleh Negara,kemudian akan di manfatakan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyatnya

DAMPAK SOSIALISME INDUSTRI

- Negara sebagai majikan baru dalam pengelolaan industry ternyata lebih tidk professional di banding dengan kapitalis sebelumnya,

- Hal itu mengakibatkan produktivitas dari industrinya terus menurun
- Selanjutnya daya saing produk dalam skala internasional juga semakin menjadi lemah, tidak kompetitif dan kurang inovatif
- Rendahnya produktivitas tersebut di akibatkan oleh hilangnya motivasi memproduksi dari kalangan pekerjaan, karena hilangnya prinsip kepemilikan yang telah di hapuskan oleh Negara
- Akhirnya seluruh rakyat yang bertindak sebagai pekerja kehidupannya semakin di tindas oleh pengusaha yang menjalankan roda industry secara tidak professional